

KISRUH BLBI BENTUK BARU NEOLIBERALISME DAN KOLONIALISME



Oleh: Achmad Deni Daruri

PADA zaman apa saja kapitalisme selalu ekspansif, selalu mengembang. Nah, cara-caranya lewat imperialisme, lewat kolonialisme, dan mungkin sekarang lewat globalisasi itu dengan paham Neoliberalismenya. Dan ini sudah terjadi sejak tahun 1500-an. Bedanya kalau dulu temponya lambat karena lewat transportasi kapal, naik udara juga lambat, sekarang bisa dengan kecepatan yang amat tinggi apalagi pergerakan arus modal sudah mencapai triliunan dolar. Dengan itu mustinya nasionalisme harus cukup kuat untuk menanggulangi aspek negatif dari globalisasi.

Kritik terhadap neoliberalisme terutama sekali berkaitan dengan negara-negara berkembang yang aset-asetnya telah dimiliki oleh pihak asing. Negara-negara berkembang yang institusi ekonomi dan politiknya belum terbangun tetapi telah dikuras sebagai akibat tidak terlindungi dari arus deras perdagangan dan modal. Bahkan dalam gerakan neoliberal sendiri terdapat kritik terhadap banyaknya negara maju telah menuntut negara lain untuk meliberalisasi pasar mereka bagi barang-barang hasil industri mereka, sementara mereka sendiri melakukan proteksi terhadap pasar pertanian domestik mereka.

Dalam kebijakan luar negeri, neoliberalisme dan kolonialisme erat kaitannya dengan pembukaan pasar luar negeri melalui cara-cara politis, menggunakan tekanan ekonomi, diplomasi, dan/atau intervensi militer/intelejen/IMF/Bank Dunia.

Kasus BLBI semenjak mencuat pada akhir

tahun 1990-an diiringi oleh pergeseran politik nasional yang berdampak serius bagi kelangsungan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan akibat semakin tingginya intervensi asing di ranah ekonomi dan politik nasional. Jatuhnya pemerintahan Suharto merupakan kasus penting maha penting dalam melakukan analisis BLBI. Dengan kata lain kontes BLBI lebih luas ketimbang konteks perbankan dan ekonomi semata. Analisis BLBI harus menggunakan perspektif ekonomi politik sehingga problem yang ada dapat terurai secara jelas dan tidak menjadi beban Negara secara berlarut-larut.

Berdasarkan data politik luar negeri Amerika Serikat yang telah keluar dan dapat diakses publik yang baru lalu maka terlihat adanya peran yang aktif dari presiden Clinton dalam perubahan politik Indonesia di tahun 1998 tersebut. Beberapa kali presiden Clinton melakukan hubungan melalui telepon dengan presiden Suharto hingga akhirnya presiden Suharto menandatangani penyerahan "kedaulatan ekonomi" Indonesia kepada IMF. Clinton tentu mendapatkan masukan bukan hanya dari CIA tetapi juga dari antek-anteknya di Indonesia. Konsekuensi penyerahan kedaulatan ekonomi tersebut pada gilirannya juga mempengaruhi kedaulatan politik bangsa Indonesia. Musgrave mengatakan bahwa fungsi ekonomi Negara mempengaruhi ranah politik bangsa melalui proses alokasi, akumulasi dan distribusi sumber dana dan daya di tanah air. Dalam konteks seperti itu, maka semua proses ekonomi dan politik setelah penandatanganan penyerahan kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia dari pemerintah Suharto kepada IMF terjadi maka tidak dapat dilepaskan dari pengaruh IMF dan Amerika Serikat termasuk proses penyaluran BLBI, pembentukan BPPN, rekapitalisasi perbankan dan penjualan aset-aset BPPN. Adalah naif jika kita mengatakan bahwa pengaruh asing tidak berpengaruh dalam semua proses tersebut dan semuanya adalah untuk semata-mata kepentingan bangsa Indonesia.

Proses BLBI juga harus dilihat dalam konteks bahwa IMF tidak mau ikut terlibat dalam memberikan pinjaman kepada pemerintah Indonesia untuk mem bail out perbankan nasional dan perekonomian Indonesia.

Dengan kata lain IMF menginginkan bahwa pihak Indonesia sendiri yang mengambil resiko dalam rangka memulihkan perekonomiannya sementara IMF bertujuan agar semua pokok dan bunga hutang luar negeri pemerintah Indonesia harus tetap dapat dibayar sesuai rencana selain juga IMF membuka konsesi ekonomi yang semula tertutup kepada pihak asing untuk segera dibuka selebar-lebarnya agar pihak asing dapat ikut mengambil keuntungan dari akibat penyerahan kedaulatan ekonomi Indonesia tersebut.

Banyak pihak hingga saat ini, khususnya kantor berita Negara asing seperti Radio Australia, BBC dsb, terus-menerus membeberitakan berita kisruh dalam BLBI dan tidak pernah membahas misalnya kegagalan IMF dalam mempercepat pulihnya perekonomian Indonesia atau korupsi dalam hutang luar negeri yang dikelola oleh Bank Dunia. Ini semua memperlihatkan akan adanya skenario asing yang memang menginginkan agar kekuatan ekonomi Indonesia terus melemah karena terus diadu domba dengan kasus BLBI ini.

Di Negara manapun di dunia proses BLBI merupakan proses yang normal yang akan dilakukan oleh pemerintah dan bank sentral manapun ketika terjadi ancaman sistemik terhadap sistem perbankan nasional. Dan hampir disemua Negara krisis ekonomi selalu merugikan Negara manapun yang biasanya dihitung secara persentase tertentu dari pendapatan domestic bruto.

Proses BLBI bukan hanya menghancurkan kekuatan ekonomi nasional karena banyak pengusaha terbaik di Indonesia terus menerus dikejar oleh kasus ini sekalipun sudah menyerahkan aset-asetnya sesuai dengan yang disetujui oleh pemerintah sendiri, tetapi juga menimbulkan moral hazard bagi IMF itu sendiri. Namun bedanya moral hazard ini bukan diterima oleh pelaku ekonomi domestic tetapi justru oleh IMF yang melakukan berbagai keputusan ekonomi namun tidak pernah menanggung resiko dari segala keputusannya tersebut. Artinya, jika krisis ekonomi kembali terjadi dan IMF kembali mengambil kedaulatan ekonomi Indonesia maka dapat dipastikan IMF akan mengulangi kejadian yang sama seperti ketika mereka mendapatkan mandate dari Suharto pada tahun 1998 yang lalu.

Permasalahannya menjadi semakin genting karena pihak yang anti IMF pun tampaknya tidak sadar bahwa kritik mereka terhadap kasus BLBI sebetulnya seirama dengan nada yang diinginkan oleh IMF, sementara itu para ekonom yang mendukung IMF by design akan selalu mempermasalahakan BLBI dengan alasan kekurangan penerimaan Negara akibat hutang luar negeri yang secara politik mendapatkan tekanan untuk diturunkan. Para ekonom yang pro IMF ini sangat berdos besar karena asset-aset yang diperoleh oleh pemerintah sebagai agunan dari BLBI ternyata dijual secara obral dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sesuai pesanan IMF sehingga kas Negara tidak memperoleh hasil penjualan asset yang maksimal. Berbeda dengan misalnya intervensi Beam Stern oleh Fed dimana Fed tidak akan langsung menjual secara sekaligus agunan yang mereka terima karena orientasinya adalah memaksimalkan keuntungan Fed.

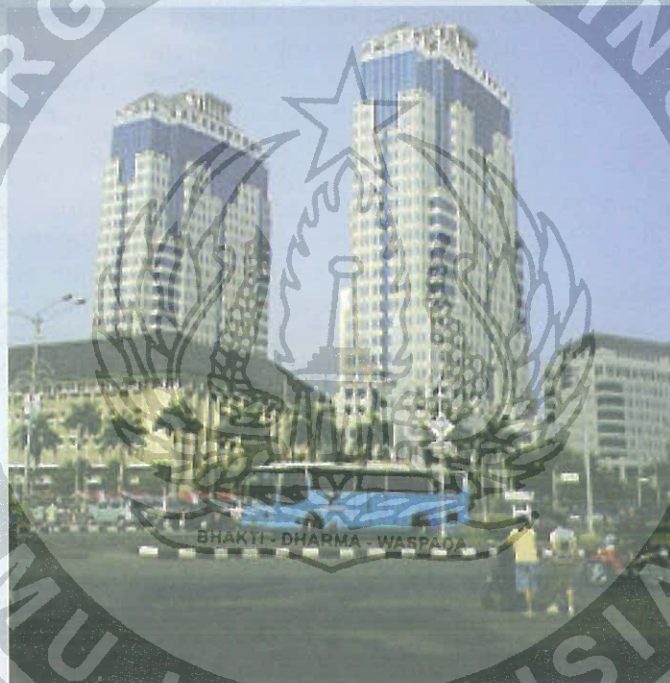
Kasus BLBI memang disengaja oleh IMF agar perekonomian Indonesia semakin melemah. Belajar dari kasus Fed dimana agunannya dikelola oleh Fed sendiri, namun di Indonesia agunannya dikelola oleh BPPN sesuai dengan design IMF. Secara ekonomi dan motivasi jelas bahwa BPPN tidak memiliki motivasi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari penjualan asset yang dikuasainya karena BPPN mendapatkan asset-aset tersebut tanpa kerja keras. Mengingat neraca Bank Indonesia yang terancam oleh kerugian BLBI maka seyogyanya Bank Indonesia lah yang mengelola asset-aset agunan tersebut.

Di sinilah kita melihat kelihaihan IMF dalam mengontrol agar perekonomian Indonesia terus melemah secara sistematis. Bukan hanya pada akhirnya asset-aset tersebut dijual secara murah kepada pihak asing tetapi juga kepemilikan asing di Indonesia menjadi meningkat secara dramatis. Lihatlah misalnya disektor perbankan dimana Bank Danamon, BII, Lippo, Niaga dan sebagainya telah dimiliki oleh asing. Belum lagi liberalisasi perdagangan dan investasi yang membuka luas peran asing di dalam perekonomian Indonesia.

IMF memang merencanakan kolonialisme baru dimana rakyat Indonesia hanyalah dijadikan rakyat pekerja murah di era globalisasi dan conundrum ini. Semangat Jenderal Sudirman yang memilih gerilya walaupun paru-

parunya sakit agar tidak dapat dikalahkan oleh pihak kolonial haruslah tetap dijaga. Pada saat diangkat menjadi panglima, Jenderal Sudirman bersumpah untuk menjaga kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia sesuai dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Bahkan sebelum diangkat sebagai panglima, Jenderal Sudirman mampu mengalahkan Inggris yang memenangkan Perang Dunia Kedua dalam pertempuran yang sangat heroik di Ambarawa. Pihak kolonial ternyata masih terus berupaya menjajah Indonesia dan ironisnya justru kini sebagian menteri dan sebagian ekonom menjadi kolaborator para penjajah asing tersebut.

Nasionalisme sebagai suatu ideologi sangat diperlukan untuk menghadapi globalisasi. Tanpa itu kita akan dilanda oleh globalisasi, tanpa itu kita tidak punya pegangan. Karena



nasionalisme dalam masa lampau telah merupakan wahana untuk menjatuhkan kolonialisme. Dan di dalam globalisasi ada aspek-aspek kolonialismenya. Dalam rangka memantapkan kebijakan neo-liberalisme, para pendukungnya secara gencar mengampunyan mitos-mitos berkaitan dengan neo-liberalisme dan lebih lanjut tentang pasar bebas. Lebih lanjut mitos-mitos itu diantaranya adalah :

1. perdagangan bebas akan menjamin pangan murah dan kelaparan tidak akan terjadi. Kenyataan yang terjadi bahwa perdagangan bebas justru meningkatkan harga pangan.
2. WTO dan TNC akan memproduksi pangan yang aman. Kenyataannya dengan peng-

gunaan pestisida secara berlebihan dan pangan hasil rekayasa genetik justru membahayakan kesehatan manusia dan juga keseimbangan ekologis.

3. kaum perempuan akan diuntungkan dengan pasar bebas pangan. Kenyataannya, perempuan petani semakin tersingkir baik sebagai produsen maupun konsumen.
4. bahwa paten dan hak kekayaan intelektual akan melindungi inovasi dan pengetahuan. Kenyataannya, paten justru memperlambat alih teknologi dan membuat teknologi menjadi mahal.
5. perdagangan bebas di bidang pangan akan menguntungkan konsumen karena harga murah dan banyak pilihan. Kenyataannya justru hal itu mengancam ketahanan pangan di negara-negara dunia ketiga.
6. IMF dan Bank Dunia betul-betul secara

tulus membantu Negara yang sedang mengalami kesulitan perekonomian. Faktanya mereka menjadi perpanjangan tangan dari Negara barat dan perusahaan asing untuk menguasai perekonomian Negara berkembang sehingga tidak ada satupun Negara maju yang mau menjadi pasien mereka.

Akibat dari gagasan-gagasan yang selanjutnya diterapkan menjadi kebijakan ini dapat kita perhatikan pada kehidupan di negeri ini. Bagaimana rakyat menjerit akibat kenaikan harga-harga seiring dengan ketetapan pemerintah mencabut subsidi BBM. PHK massal mewabah karena efisiensi perusahaan akibat meningkatnya beban biaya produksi. Mahalnya harga obat karena paten dan hak cipta yang membuat rakyat makin sulit mendapatkannya. Mahalnya biaya perawatan rumah sakit karena swastanisasi. Makin tercekiknya kesejahteraan petani akibat kebijakan impor beras dan diperburuk dengan mahalnya harga pupuk dan obat-obatan pembasmi hama. Masih banyak contoh yang dapat kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita.

Kesimpulannya adalah sudah sangat jelas bahwa penjahat ekonomi utama di Indonesia bukanlah mereka yang terlibat dalam kasus BLBI namun sebagian menteri yang menjadi antek-antek IMF yang terbukti telah menjual kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia kepada bangsa asing. Merdeka!!!

***Penulis adalah President Director Center for Banking Crisis